

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DILINGKUNGAN KELURAHAN PATIHAN

NO	JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
			PENGECUALIAN	AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1	Arsip daftar orang yang masuk G30s/PKI dan organisasi terlarang lainnya	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf J; - UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf h;	Sampai ada persetujuan dari orang bersangkutan/pihak berwenang	Mengungkap rahasia pribadi	Melindung data pribadi
2,	Arsip dinamis, aktif dan inaktif, yang berisikan: a. Dokumen keuangan: - SPJ berikut lampirannya dokumen anggaran dan otorisasinya - Surat pencairan anggaran b. Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat c. Memorandum/surat-surat penting yang perlu dirahaskan	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 ; - UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan D7(2)	- Selama masih berlaku. - Selama masih berlangsung penyelenggaraannya. - Selama Status perlindungan masih berlaku	- Menghambat proses penegakan hukum - Mengganggu kepentingan perlindungan hak - Merugikan kepentingan kepemilikan pribadi Menggangu proses pelaksanaan kegiatan	- Menyediakan data lengkap yang dilindungi dalam proses penegakkan hukum - Melindungi kepentingan kepemilikan pribadi - Melancarkan proses pelaksanaan kegiatan
3,	Disposisi surat pimpinan	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i;	Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengelola surat	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
4,	Data Pribadi Penduduk (No KK, NIK)	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i; - UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 84 ayat(1) dan (2), Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3)	Sampai terbitnya Keputusan Mendagri/Gubernur/Bupati/Wali Kota tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penduduk.	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang.
5,	Daftar Nilai SKP PNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
6,	Keputusan ijin/keterangan tentang perceraian PNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS - Mengamankan proses penyusunan kebijakan

7,	Kegiatan intelijen terkait dengan ideologi, politik, sosial, budaya dan keamanan serta penanganan kasus yang mengganggu masyarakat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c; - UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara	Selama pengungkapannya membahayakan atau merusak sumber-sumber dan metode intelijen yang sensitif	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan negara(stabilitas daerah dan wilayah)
8,	Dokumen penyelesaian sengketa/konflik tanah	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Sampai dengan diserahkan kepada penuntut (jaksa)	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum
9,	Usulan calon penerima bantuan sosial kemasyarakatan (PKH, BPNT, BPNTD, LANSIA)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf b, Pasal 17 huruf b dan huruf i	Sampai dengan diterbitkannya Keputusan Walikota	- Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	- Melindungi calon penerima bantuan dari persaingan usaha yang tidak sehat - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
10,	Data Objek Pajak Dan Restribusi	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Pasal 40 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Sampai ada perintah dari penegak hukum/yang berwenang	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi/mengamank an database objek pajak dan restribusi
11,	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan	Mengungkap rahasia(data kekayaan) pribadi	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi
12,	Laporan Keuangan (laporan keuangan yang belum diaudit)	- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan